

# Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

## Coastal Areas Development Strategy in The Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province

Andi Fajar Asti<sup>1</sup> dan \*Diana Mayasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar,  
Jl. Tamalate I Tidung Makassar 90222, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Pasundan  
Kampus IV Jl. Sumatera No. 41 Kota Bandung, Jawa Barat 40261, Indonesia

### ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 24 Oktober 2022  
Perbaikan naskah: 22 Maret 2023  
Disetujui terbit : 12 Mei 2023

Korespondensi penulis:  
Email: mayasaridiana8@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v9i1.11796>



### ABSTRAK

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi di sektor perikanan yaitu perikanan tangkap, pengelolaan produk, dan pembudidayaan, sektor pariwisata dan pelabuhan. Pengembangan potensi tersebut belum dapat menyejahterakan para nelayan karena harga jual hasil perikanan masih rendah dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup untuk budi daya ikan dan memasarkan hasil tangkapan. Tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi potensi sumber daya pada kawasan pesisir dan merumuskan strategi pengembangan potensi sumber daya di kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan potensi kawasan pesisir, dan merumuskan strategi pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut. Data diperoleh langsung dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanah Laut, nelayan, atau masyarakat tinggal di kawasan pesisir. Strategi pengembangan kawasan pesisir dilakukan dengan menganalisis potensi terhadap kegiatan nelayan sehari-hari yaitu menangkap ikan yang ditangkap dan permasalahannya di lapangan. Analisis tersebut untuk mencari solusi untuk mengembangkan produk olahan sehingga bernilai jual lebih tinggi. Sementara itu, pemerintah daerah berkontribusi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengembangkan pariwisata, fasilitas sarana prasarana, dan pelabuhan yang mendukung kegiatan transaksi jual beli. Pemerintah memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Produk yang berkualitas dapat diolah dan dijual sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan program lain yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia di wilayah pesisir Kabupaten Tanah Laut.

**Kata Kunci:** strategi pengembangan; potensi; kawasan pesisir; pariwisata; masyarakat pesisir

### ABSTRACT

*Tanah Laut Regency possesses substantial potential in the fisheries sector, including capture fisheries, product management, cultivation, tourism, and port activities. However, the livelihoods of fishermen have not significantly improved due to low selling prices and a lack of understanding in fish cultivation and marketing. This research aims to address these challenges by identifying untapped resources in the coastal area and formulating comprehensive strategies for their development. The study utilizes descriptive methods and a qualitative approach, analyzing factors that hinder potential and tailoring strategies to Tanah Laut Regency. Data were collected from the Department of Fisheries and Marine Affairs, fishermen, coastal residents, and online sources. The development strategy involves analyzing daily fishing activities, fish species production, and field-related challenges to enhance the economic prospects of the region. The local government plays a crucial role in facilitating community and stakeholder involvement, supporting tourism, improving infrastructure, and establishing trading ports. Ongoing counseling and training initiatives are provided to empower fishermen with skills and knowledge. The processing and sale of high-quality fishery products have the potential to boost the local economy. Future plans include supplementary programs to improve the environment and develop human resources in the coastal area, fostering sustainable growth and prosperity. By unlocking the region's potential through holistic measures, Tanah Laut Regency can thrive.*

**Keywords:** development strategy; potential; coastal areas; tourism; coastal communities

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan kawasan *minapolitan* adalah belum terbangunnya jalan penghubung dari sentra produksi menuju

pelabuhan sehingga menghambat distribusi karena belum ada pengembangan kawasan industri. Dalam pengelolaannya, sumber daya manusia (SDM) masih terbatas dengan kondisi kehidupan masyarakat yang relatif belum mencapai kesejahteraan yang layak. Akibat masih rendahnya kualitas sumber daya manusia terlihat pada keterampilan yang dimiliki,

permodalan, dan infrastruktur. Menurut Barani (2004), di wilayah perairan di laut Indonesia, terdapat jenis ikan yang bernilai ekonomis dan mempunyai nilai jual tinggi, yaitu udang, cakalang, tuna, kakap, tenggiri, cumi, ikan karang (baronang, kerapu, udang lobster/barong), ikan hias, kerang, dan rumput laut (Fikki, 2018). Pada bidang perikanan, pengolahan hasil produksi perikanan yang berasal dari perikanan tangkap maupun perikanan budi daya dinilai masih lemah. Hambatan yang memengaruhi pertumbuhan subsektor perikanan adalah masih terbatasnya kemampuan maupun keahlian sumber daya manusia, kurangnya sarana penegakan hukum yang mengakibatkan sering terjadinya penangkapan ikan ilegal dan konflik antar nelayan, dan masih minimnya modal serta dukungan peralatan tangkap ataupun budi daya yang digunakan (Nurafiah, 2020).

Keterbatasan penerapan teknologi untuk mengembangkan produk menyebabkan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat masih kurang dalam peningkatan kualitas (Jamal, 2019). Banyaknya produk usaha perikanan, terutama hasil olahan tanpa label, mengurangi *traceability* produk sehingga nilai tambah yang akan diperoleh daerah belum mampu bersaing. Permasalahan dalam pengembangan budi daya perikanan rumput laut dan produk unggulan lain seperti ikan kerapu terutama berkaitan dengan kesulitan pemasaran produk, ketersediaan benih dan indukan berkualitas, serta terbatasnya pakan ikan untuk budi daya perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036, ada beberapa kecamatan yang termasuk kawasan *minopolitan*, yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki dalam satuan sistem permukiman dan sistem *minopolitan* (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, 2021). Sumber daya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat, terutama bagi nelayan (Basri, 2020). Berdasarkan studi penelitian di wilayah Kabupaten Tanah Laut, sektor yang memiliki posisi terendah memiliki pertumbuhan sektor kurang dari 4% yang salah satunya memiliki pertumbuhan yang negatif, yaitu sektor pertanian. Sektor perikanan memiliki pertumbuhan sebesar 3,50% yang pada tahun 2016 mencapai 19,65%. Namun, pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan menjadi 19,20% pada tahun 2020. Kawasan agropolitan Tanah Laut berpotensi untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing yang berbasis peningkatan UMKM perikanan dalam pengelolaan ikan hasil tangkap nelayan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Tanah Laut sangat berpotensi untuk menciptakan surplus produk agro yang menjadi sumber ekspor ke luar provinsi, bahkan dapat menjadi komoditas ekspor (Sukamta, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJM] Tahun 2018--2023, 2019). Di kawasan pesisir, sistem dan usaha agribisnis dikembangkan untuk mampu melayani, mendorong, menyuplai, dan melakukan kegiatan pengembangan perikanan di Kabupaten Tanah Laut (Bappeda Kabupaten Tanah Laut, 2020). Adapun strategi pengembangan kawasan untuk sektor perikanan agar mempunyai kekuatan pasar dan menunjang ketahanan pangan nasional dilakukan melalui pengembangan masyarakat. Pengembangan tersebut tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budi daya, tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu dalam penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan agribisnis (proses dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kemudahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan menyeluruh, mulai dari subsistem budi daya perikanan hingga subsistem agribisnis hulu ke hilir. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah barat dan wilayah tengah serta antara wilayah timur dan wilayah tenggara daerah;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah;
3. Peningkatan perlindungan kawasan lindung;
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budi daya;
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya

tampung lingkungan dan kegiatan penangkapan ikan di laut dibuat wadah menampung hasil tangkapan nelayan dengan harga jual layak meningkatkan taraf hidup nelayan;

7. Peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan kawasan berbasis *minapolitan* diharapkan dapat menjadi pendorong percepatan pengembangan kawasan yang berfungsi sebagai komoditas perikanan. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi kawasan pengolahan, penyimpanan, dan penjualan yang dapat membantu mendukung pengembangannya (Tasnia, 2021).

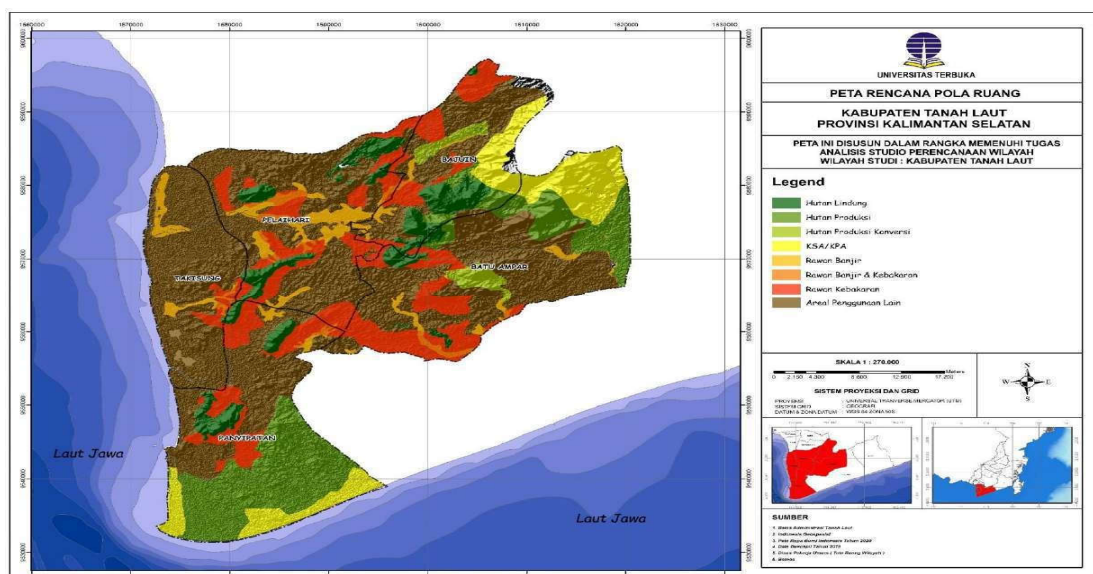
Pada segi ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan nelayan dilakukan melalui pariwisata, perbaikan infrastruktur lingkungan di wilayah pesisir, adanya fasilitas pelabuhan dapat dijadikan jalur alternatif yang berbatasan dengan Laut Jawa dan Sulawesi, serta pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, tujuan penelitian didasarkan pada permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian latar belakang yang menjelaskan strategi mengembangkan potensi di kawasan pesisir, yaitu; 1) mengidentifikasi potensi sumber daya pada

kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut, dan 2) mengetahui, memahami, dan menganalisis strategi pengembangan potensi sumber daya di kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut.

### Pendekatan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan pada bulan Februari–September 2022. Kawasan perikanan yang letaknya di sepanjang wilayah pesisir bergaris pantai lokasi di Kabupaten Tanah Laut serta berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Makasar. Wilayah ini memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial yang meliputi sektor perikanan, pariwisata, sektor industri perikanan dan pelabuhan.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada masyarakat nelayan. Dokumentasi kondisi dilakukan langsung ke objek penelitian. Data berupa data perikanan, data nelayan, jumlah alat tangkap, jenis ikan, jumlah ikan yang ditangkap dan produksi ikan di kawasan pesisir diambil dari berbagai sumber, yaitu dari BPS, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Laut, dan dari dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir, Badan Pusat Statistik, dokumen pemerintahan, dan internet. Kondisi objek pada ruang lingkup penelitian atau data yang tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan sederhana. Data kualitatif ini termasuk potensi wilayah kawasan *minapolitan*, kondisi wilayah penelitian, sosial



Gambar 1. Peta Kabupaten Tanah Laut.

Sumber: Peta diolah oleh Argis, 2022, Universitas Terbuka Banjarmasin.

budaya masyarakat, dan data lebih mendalam dalam penelitian. Identifikasi potensi wilayah diperlukan dalam upaya pengembangan industri perikanan sehingga dapat dibuat strategi dan teknologi yang tepat untuk pengembangan industri perikanan di setiap daerah (Athirafitri, 2021).

Analisis data yang digunakan untuk memetakan pengembangan di kawasan pesisir adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan strategi pengembangan potensi kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, meneliti kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat simpulan atas temuannya (Abdussamad, 2021). Fokus penelitian ini terpusat pada strategi pengembangan potensi kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk yang dapat mengidentifikasi jumlah nelayan, jumlah atau jenis alat tangkap ataupun armada penangkapan yang merupakan faktor utama yang memengaruhi hasil tangkapan, jumlah hasil tangkapan yang didaratkan, upaya penangkapan yang dilakukan masyarakat nelayan kawasan pesisir, dan budi daya yang dilakukan nelayan di Kabupaten Tanah Laut. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan sumber daya perikanan dan produksi hasil tangkapan ikan setiap bulannya.

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota kabupaten berada di Kota Pelabuhan yang berjarak sekitar 60 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Tanah Laut terdiri atas 11 wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 135 desa/kelurahan dan dengan luas wilayah 3.631,35 km<sup>2</sup> atau 363.135 ha. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi daerah yang baik, yaitu pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Potensi pertanian, peternakan, dan perikanan dapat dikembangkan sebagai kawasan *agropolitan* ke kawasan *minapolitan*, yaitu kawasan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan dengan adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan permukiman dan sistem minabisnis berdasarkan data Badan Pusat

Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 (Ubadiyah, 2022).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut merupakan wilayah dengan sektor andalan dan menguasai sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut terutama di pedesaan. Ekosistem perairan yang terbilang lengkap seperti perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir, dan pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, padang lamun, mangrove, hingga perairan umum seperti waduk, danau, sungai, dan embung yang berlimpah sumber daya perikanan dan kelautan. Sebagian besar hasil produksi perikanan di Kabupaten Tanah Laut masih dipasarkan dalam bentuk primer dan sebagian masih belum masuk ke dalam kegiatan pengolahan hasil sehingga masyarakat tidak memperoleh nilai tambah. Oleh sebab itu, pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan di bidang pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, perkebunan dan kehutanan merupakan kebijakan holistik (*holistic policy*), baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu dibutuhkan integrasi ataupun sinkronisasi program baik antar tingkatan pemerintah maupun koordinasi antara lembaga/unit satuan kerja dan dunia usaha beserta organisasi profesi yang lain. Peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Nafarin, 2017).

Pada umumnya air tanah bersifat payau dan asin, banyak ditumbuhi vegetasi secara alami berupa hutan mangrove untuk rataan pasang surut. Sedangkan pematang di pantai ditumbuhi vegetasi khas lahan berpasir, seperti ketapang, pandanus, cemara pantai, dan akasia. Satuan rataan pasang surut banyak dimanfaatkan sebagai lahan tambak dan permukiman nelayan, seperti di Pantai Ujung Panyipatan, Kuala Tambangan, dan Muara Tabanio. Sementara itu, pematang pantai banyak dikembangkan sebagai kawasan permukiman nelayan dan wisata alam pantai, seperti di Pantai Batakan, Pantai Tanjung Dewa, Pantai Batu Lima, dan Pantai Takisung.

Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di atas sungai-sungai besar dan kecil bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka dengan luas 640 km, Sungai Tabanio dengan luas 770 km, Sungai Sabulur dengan luas 190 km, dan Sungai Sawarangan dengan luas 580 km. Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah sebagai sumber air minum, pengairan, usaha perikanan, serta sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dan daerah-

daerah barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut adalah Rawa Benua Raya (6.600 ha), Rawa Panjaratan (2.500 ha), dan Rawa Sanipah (5.600 ha). Pada musim hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik yang terus-menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan (RTRW Kabupaten Tanah Laut, 2016).

Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan terdiri atas kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budi daya, kawasan pengolahan perikanan, dan kawasan konservasi sumber daya perikanan. Luas kawasan perikanan tangkap kurang lebih 219.498,44 ha (Sukamta, 2019), diperuntukan untuk perikanan tangkap darat yang tersebar di seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Bumi Makmur, dan Kurau. Komoditas unggulan berupa ikan gabus, betok, nila, patin, udang, serta pengembangan rumput laut. Perikanan tangkap laut terdapat pada hampir semua kawasan perairan sampai 4 mil laut di luar peruntukan alur dengan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, dan tempat pelelangan ikan di Kecamatan Jorong, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Kintap.

Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebesar kurang lebih 3.969,35 ha termasuk di dalam kawasan *minapolitan* seluas kurang lebih 530,95 ha

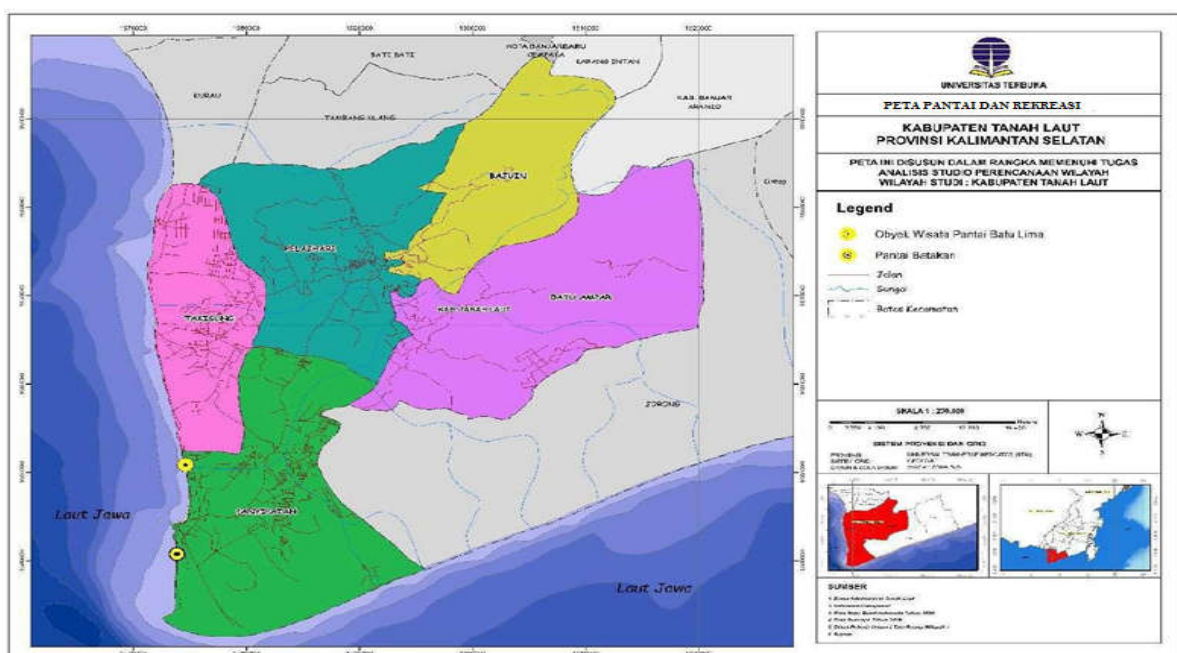
(Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016--2036, 2016). Kawasan tersebut terdiri atas kawasan (1) perikanan budi daya air tawar meliputi jenis ikan introduksi dan jenis ikan lokal yang tersebar di setiap kecamatan; (2) perikanan budi daya air laut meliputi ikan, udang, kepiting, kerang-kerang, serta rumput laut di Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Kurau, dan Kecamatan Bumi Makmur; dan (3) perikanan budi daya air payau meliputi udang, bandeng, dan kepiting yang terdapat di Kecamatan Panyipatan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah produksi hasil laut produksi ikan dari perairan laut pada tahun 2021 sebesar 59.964 ton, sedangkan produksi dari perairan umum sebesar 4.581,1 ton (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut, 2022).

Berikut ini adalah jumlah rumah tangga yang melakukan budi daya yang terdiri atas budi daya

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budi Daya Menurut Jenis Budi Daya di Kabupaten Tanah Laut.

Usaha Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Budi Daya
Tambak	107
Kolam	511
Keramba	13
Jaring Apung	31
Budi Daya Laut	0

Sumber: Data primer diolah, 2022.



Gambar 2. Peta Kawasan Perikanan dan Kelautan.

Sumber: Peta diolah oleh Argis (2022), Universitas Terbuka Banjarmasin.

tambak dan kolam.

Berikut ini menjelaskan data produksi

**Tabel 2. Produksi Perikanan Budi Daya di Kecamatan Tanah Laut per Ton Tahun 2021.**

Keterangan	Jumlah (Ton)
Tambak	1045,47
Kolam	272,39
Keramba	34,38
Jaring Apung	34,55
Budi Daya Laut	0

Sumber: Data primer diolah, 2022.

perikanan budidaya laut di hasilkan oleh masyarakat dijelaskan pada Tabel 2.

Produksi ikan yang dibudidayakan oleh para nelayan di kawasan pesisir di antaranya adalah ikan bandeng, ikan mas, nila, lele, dan patin yang dihasilkan dari tambak dan kolam.

Pemanfaatan perikanan tangkap berupa bagan tancap kegiatan perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan *lampara* dasar dan jaringan atau *micing*. Wilayah tersebut merupakan wilayah perairan KKP yang menjadi pusat *fissing ground* bagi nelayan-nelayan dari Tanah Laut dan daerah jalur pelayaran tongkang. Potensi sumber daya perikanan di Indonesia didapatkan dari sumber daya perikanan tangkap, budi daya laut, dan perairan umum (Amir, 2021). Potensi juga terdapat di wilayah kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut yang didukung dengan ketersediaan pelabuhan dan objek wisata.

### Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Tanah Laut

Pengembangan dengan destinasi pariwisata meliputi kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata

budaya dan bagi pariwisata alam yang terdapat di dalam kawasan *minipolitan* yang terletak di wilayah dilengkapi permukiman nelayan, sentra pengelolaan hasil perikanan, pelabuhan, perkapalan, pusat kuliner ikan, pusat kegiatan aktivitas nelayan, budi daya, dan kegiatan ekonomi (Jamilah & Mawardati, 2018). Konsep pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan dengan program *minapolitan* untuk meningkatkan produksi perikanan. Namun, tidak semua komoditas perikanan didorong untuk meningkatkan produksi. Pengelolaan wilayah pesisir dengan menonjolkan potensi sumber daya alamnya masing-masing memberi dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, bahkan tidak ada lagi masyarakat miskin di wilayah pesisir pantai (Dewi, 2018).

Sudut kepentingan sosial budi daya adalah kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 592,26 Ha (Perda Kab. Tanah Laut, 2016). Kawasan untuk pariwisata budaya terdiri atas kawasan situs-situs sejarah di Tabanio, Desa Tabanio, Kecamatan Takisung dan di Bunker Jepang, Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin. Kawasan untuk pariwisata alam adalah kawasan pelestarian alam atau kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Batakan di Desa Batakan, Kecamatan Panyioatan; kawasan Hutan Lindung Bajuin di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin; kawasan hutan kota dan wisata Gunung Kayangan di Kecamatan Pelaihari; air terjun Bajuin di Kecamatan Bajuin; dan kawasan gua di Kecamatan Bajuin yang meliputi Gua Marmer, Gua Semprong, Gua Liang Bebau; Pantai Batakan di Kecamatan Panyipatan; dan Pantai Takisung di Kecamatan Takisung.

Ada beberapa pulau kecil di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ekowisata atau wisata bahari. Pulau Denawan yang terletak di Kabupaten Kota Baru. Pulau indah ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Pulau

**Tabel 3. Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan dan Jenis Budi Daya di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.**

Keterangan	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)	Nilai Produksi (Rupiah)
Tambak	Ikan Bandeng	826,6	12.399.000.000
	Udang Windu	218,9	21.890.000.000
Kolam	Ikan Mas	21,08	632.430.000
	Nila	28,9	868.500.000
	Lele	130,9	2.094.816.000
	Patin	74,5	1.117.680.000
	Lainnya	16,9	522.257.000
Keramba	Ikan Mas	15,6	458.250.000
	Nila	18,6	560.370.000
Jaring Apung	Nila	18,6	1.036.440.000

Sumber: Data primer diolah, 2022

Denawan memiliki pasir putih halus. Pengunjung pulau ini berkesempatan untuk menyaksikan penyu yang bertelur di pantai ini. Pulau lainnya, yaitu Pulau Payung-payungan yang terletak di Kabupaten Kotabaru, merupakan pulau yang memiliki kontur pulau berbatu. Pantai di pulau ini merupakan pantai yang bersih dengan kondisi air jernih dan tentunya alam bawah air yang indah dengan terumbu karangnya. Selain kedua pulau itu, juga terdapat Pulau Marabatuan yang juga terletak di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Potensi yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah rumput laut minim, kolam tenang sekitar 160, tambak sederhana, jaringan apung tawar sekitar 124 dengan kualitas lingkungan hidup sekitar 68,7. Hasil potensi dari perikanan tangkap yang dihasilkan dari perikanan tangkap dan perairan umum berdasarkan hitungan pada tahun 2021 adalah ikan tongkol berjumlah 1.051 ton, udang berjumlah 3.534 ton, dan hasil lainnya berjumlah sekitar 181 ton, serta volume tangkap di laut diperoleh sekitar 4.766 ton. Jika diubah menjadi produk berkualitas dan berbentuk produk hasil olahan layak jual, hasil dapat meningkatkan pendapatan APBD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Objek wisata yang dikembangkan secara berkelanjutan dari segi infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai akan memiliki daya tarik tersendiri, apalagi wilayah Kabupaten Tanah Laut memperbaiki dan melengkapi fasilitas di pelabuhan. Wilayah ini menjadi daya tarik untuk tempat singgah.

Secara makro, optimalisasi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup. Pada akhirnya, hampir setiap kecamatan memiliki tempat wisata dengan daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, langkah lebih baik bila destinasi pariwisata tersebut dipasarkan secara bersama-sama, terutama destinasi wisata unggulan seperti Pantai Takisung dan Pantai Batakan. Selain pemasaran, perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun akses menuju kawasan wisata, membangun sarana pendukung wisata misalnya hotel dan restoran, serta mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Harapannya adalah pengembangan ekonomi kreatif di bidang pariwisata akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Tanah Laut.

Indikasi untuk arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau yang diharapkan peneliti sebagaimana ditetapkan adalah sebagai

berikut.

- a. Dilarang melakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang memengaruhi fungsi kawasan dan mengubah bentang alam untuk meminimalkan dampak bencana yang dapat terjadi pada masa mendatang.
- b. Dilarang melakukan penebangan mangrove di kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mulai membangun kesadaran untuk melakukan perawatan dan menjaga kondisi sekitar kawasan pesisir.
- c. Budi daya perikanan diizinkan sepanjang memenuhi kaidah konservasi di sekitar kawasan pesisir dan tidak merusak ekosistem perairan darat ataupun laut di kawasan pesisir.
- d. Dilakukan telaah pemberian izin untuk melakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai yang mempunyai hutan bakau dan habitat satwa liar yang ada.
- e. Diizinkan pembangunan prasarana wilayah untuk kepentingan kemajuan bersama serta dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi perikanan.
- f. Diizinkan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata yang mengajak untuk kegiatan konservasi pantai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi di wilayah pesisir sebagai prioritas alokasi ruang laut sebagai perwujudan pengelolaan berbasis ekosistem.
- g. Dilakukan pemantauan dan dilarang melakukan budi daya yang merusak atau ekspose secara berlebihan untuk kepentingan golongan. Dilarang juga melakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai di kawasan sempadan sungai.
- h. Diperhatikan pemberian izin dalam pembangunan agar tidak terjadi masalah yang dapat merusak lingkungan sekitar dan merugikan nelayan. Diizinkan melakukan budi daya lain yang menunjang kegiatan pariwisata.
- i. Kawasan hutan tetap dijaga untuk keseimbangan alam.

Kawasan sempadan sungai yang terletak tidak jauh dari kawasan pemukiman ditata dan/atau direvitalisasi untuk mendukung kelancaran arus sungai, kelestarian bantaran sungai dan diupayakan jalan inspeksi yang ramah lingkungan. Beberapa kawasan terdampak banjir yang menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

adalah tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Panyipatan di Desa Batu Tunggu, Kecamatan Pelaihari di Desa Ambungan, dan Kecamatan Takisung di Desa Ranggung. Dampak banjir tersebut adalah sekitar 412 unit rumah warga terendam banjir (BNPB, 2022). Berdasarkan hasil wawancara, banjir terjadi hampir setiap tahun berupa luapan air sungai saat musim hujan yang berdampak pada akses kegiatan atau aktivitas masyarakat yang terhambat. Selain itu, faktor alam memengaruhi hasil tangkap para nelayan.

Arahan mengenai sistem jaringan transportasi laut yang diharapkan lebih baik pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas untuk menunjang fungsinya menjadi lebih baik lagi.
- b. Pelabuhan laut mempunyai jalur khusus baik secara primer atau sekunder untuk kemudahan akses menuju pelabuhan dengan kegiatan perikanan tidak bergabung dalam pelaksanaannya.
- c. Lokasi pelabuhan dilihat dari kelayakan lingkungan, kondisi geografis, dan disetujui oleh pemerintah daerah.
- d. Transportasi menuju pelabuhan laut disediakan sarana yang memudahkan untuk menjangkau lokasi tujuan.

### Strategi Pengembangan Potensi

Pengembangan sarana pemasaran produk hasil agribisnis kawasan strategis *minapolitan* di Kabupaten Tanah Laut bagian tengah dilakukan melalui pembangunan pusat informasi kawasan *minapolitan* yang nantinya dapat bersinkronisasi dengan sektor pariwisata untuk pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Pengembangan produk dapat memanfaatkan sektor pariwisata untuk memasarkan produk hasil olahan yang dijual langsung kepada para wisatawan dan dapat memanfaatkan dukungan pemerintah untuk memasarkan produk di luar wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi ikan yang ada untuk mengembangkan kawasan *minapolitan* (Mukarim, 2021). Pusat informasi kawasan *minapolitan* adalah tempat para pelancong ataupun masyarakat dapat menerima informasi tentang kondisi kawasan strategis *minapolitan*, aktivitas budi daya, dan potensi alam yang mendukung untuk usaha perikanan, baik budi daya maupun tangkap (Nugroho & Widayanti, 2020). Selain itu, terdapat industri pengolahan perikanan serta ragam produk hasil perikanan ataupun produk hasil industri

olahannya. Segala informasi mengenai produk hasil perikanan, produk olahan, serta informasi yang terkait dengan penemuan bibit/benih unggulan juga disertakan di pusat informasi agropolitan ini. Tujuan adalah agar masyarakat lebih mengenal dan memahami potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut bagian tengah dan masyarakat pada akhirnya dapat menjaga, melestarikan, serta ikut mengembangkan agribisnis komoditas unggulan yang ada. Pengembangan kawasan *minapolitan* menjadi lebih meningkat bersamaan dengan peningkatan jumlah produksi dan produktivitas lahan budi daya perikanan lama ataupun penggunaan lahan kurang produktif menjadi lahan budi daya (Santoso *et al.*, 2019). Pengembangan hasil budi daya laut memudahkan ketersediaan pasokan dan meningkatkan produksi perikanan budi daya dengan penyediaan induk unggul sehingga menghasilkan benih ikan yang bermutu dan berkualitas baik (Sahpitri, 2021).

Pengembangan pusat informasi kawasan strategis *minapolitan* ini akan dilakukan di Kecamatan Pelaihari (Pusat Kawasan Strategis Minapolitan Kabupaten Tanah Laut Bagian Tengah). Sebagai bahan pertimbangan, kecamatan ini merupakan pintu masuk menuju kecamatan lain yang merupakan tujuan pariwisata oleh masyarakat lokal, nasional, dan mancanegara. Adanya kerja sama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengembangkan produk hasil olahan sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain. Dalam bisnis perikanan, meningkatnya olahan hasil laut dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah. Diharapkan pemerintah mulai melakukan pembinaan meningkatkan produk perikanan memfasilitasi sistem UMKM.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pengembangan potensi kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Sarana infrastruktur jalan sebagai akses menuju kawasan pesisir dan lokasi objek wisata perlu diperbaiki.
- b. Alur pelayaran untuk melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antarprovinsi di Pelabuhan Kinatap dan Swarangan Jorong diperbaiki agar memudahkan dalam melayani pelabuhan khusus pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kapal bertonase besar.
- c. Jaringan lalu lintas menjadi perhatian, yaitu ketersediaan fasilitas yang memadai dari segi



- prasana aman untuk aktivitas pelayaran industri.
- d. Rencana pengembangan industri pengelolaan ikan dan potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan pada masa mendatang produksi tangkapan dapat ditingkatkan. Peningkatan hasil tangkapan harus disertai dengan kegiatan penanganan pengelolaan ikan, yaitu pengawetan hasil tangkapan dengan kualitas yang baik (tidak rusak) dengan penanganan baik sehingga pemasaran dapat diperluas.
  - e. UMKM berbasis perikanan harus memperhatikan kualitas produk akan dijual. Untuk meningkatkan pengelolaan produk ikan yang memiliki nilai tambah diperlukan dukungan dari pemerintah, baik dalam memberikan kemudahan mengurus izin produk pengelolaan ikan, dalam menyediakan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas produk olahan dan meningkatkan pendapatan nelayan, maupun dalam menyusun rencana induk (*master plan*) percepatan dan perluasan pembangunan ekomoni di Kabupaten Tanah Laut.
  - f. Program pengembangan kawasan perikanan (*minapolitan*) merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pesisir (Agam, *et al.*, 2021). Kebijakan *minapolitan* merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan dengan mata pencarian di sektor perikanan. Program *minapolitan* dapat melindungi ekosistem laut, juga melindungi nelayan kecil dari nelayan besar yang menggunakan pukat harimau yang berdampak pada ketersediaan hasil laut. Peraturan dibuat untuk melindungi ekosistem laut dan nelayan kecil dalam penggunaan fasilitas tangkap. Tujuan pembuatan peraturan atau kebijakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerataan pendapatan dengan budi daya ikan, dan pengelolaan ikan dengan kebijakan *minopolitan* komoditas.
  - g. Pemerintah membuka kesempatan kepada investor untuk membantu pengembangan objek wisata.
  - h. Pemerintah mengoptimalkan program peningkatkan kesejahteraan kawasan pesisir dengan melakukan pengawasan dan memberikan dukungan secara berkelanjutan.

Permasalahan yang terjadi di lapangan saat ini adalah meningkatnya harga bensin yang berdampak buruk bagi kehidupan para nelayan.

Pengaruh para tengkulak makin mempersulit para nelayan, terlebih lagi harga jual ikan sangat rendah menyebabkan utang nelayan bertambah terus. Banyak masyarakat nelayan tidak mampu mengembangkan usahanya karena dipengaruhi oleh minimnya permodalan (Septiani, 2018). Upaya yang harus menjadi perhatian dan digiatkan oleh pemerintah adalah program penyuluhan berbasis sosial dan budaya yang akan mengubah pola pikir dan gaya hidup nelayan, memudahinya penyaluran hasil tangkapan nelayan, mendirikan koperasi secara mandiri, dan meningkatkan potensi keahlian nelayan untuk mengembangkan ke produk UMKM. Kebijakan pemerintah harus sinergis dengan kepentingan masyarakat nelayan untuk kesejahteraan di kawasan pesisir. Selain pemerintah sebagai pembuat kebijakan, ada pihak swasta yang memiliki peran sebagai objek kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya (Karlina, 2021). Selain menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat pesisir, terlebih khusus masyarakat Kabupaten Tanah Laut, perikanan juga merupakan salah satu sektor utama pembangunan daerah. Sektor perikanan memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu berupa ketersediaan sumber daya alam yang sangat besar serta mampu menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing tinggi (Alamri, 2021).

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengembangan potensi di kawasan pesisir tampak pada beberapa segi. Pada segi ekonomi adalah meningkatkan pendapatan nelayan serta membangun sektor pariwisata, infrastruktur yang memadai, dan fasilitas pelabuhan. Permasalahan yang terjadi pada nelayan disebabkan oleh kualitas sumber daya perikanan, alat tradisional yang digunakan, serta pengeluaran para nelayan yang membengkak akibat harga bahan bakar naik sementara hasil penjualan kepada tengkulak hanya naik sedikit dan menjadi beban bagi nelayan untuk menutupi biaya operasional. Selain itu, faktor alam dan fasilitas yang sangat minim yang dimiliki oleh para nelayan menyebabkan kesulitan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan (Sriyono, 2021). Dalam suatu kawasan strategis *minapolitan*, perlu disediakan pelabuhan perikanan (Malik, 2022). Hal ini karena pengelolaan pelabuhan yang dilakukan belum optimal sehingga hasil nelayan berdampak pada penyaluran yang tidak baik. Padahal, sebagai kawasan di lintas Laut Jawa dan Sulawesi, Kabupaten Tanah Laut mempunyai peluang bila dikembangkan. Strategi mengatasi kemiskinan nelayan adalah dengan meningkatkan

UMKM hasil tangkap dan budi daya nelayan dengan penyuluhan dan dukungan pemerintah.

## PENUTUP

Pengembangan potensi kawasan pesisir dilakukan dengan adanya arahan dalam meningkatkan potensial sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor transportasi. Setiap sektor memiliki potensi lokal yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di kawasan pesisir. Dalam rangka menunjang potensi kawasan pesisir, pemerintah melengkapi kawasan tersebut dengan fasilitas dan sarana pelayanan yang akan mendorong kegiatan perekonomian serta mampu menarik investasi untuk masuk ke kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut. Potensi pengembangan wilayah kawasan pesisir sangat menjanjikan jika didukung dengan ketersediaan fasilitas pelabuhan. Fasilitas nelayan harus dibenahi. Pemerintah diharapkan memberikan pelatihan kepada nelayan untuk dapat mengembangkan hasil tangkap dari nelayan menjadi produk dengan nilai jual tinggi melalui pengembangan UMKM perikanan. Permasalahan nelayan di lapangan adalah hasil tangkap yang dijual murah kepada tengkulak. Diharapkan ada perubahan kebijakan dalam memfasilitasi nelayan secara langsung untuk menyuplai tangkapan nelayan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para nelayan, khususnya di kawasan pesisir.

Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah menggali permasalahan yang terjadi dan potensi sumber daya pada kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat nelayan, perkembangan infrastruktur, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, strategi pengembangan potensi sumber daya di kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembangunan secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka Banjarmasin, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Perkotaan yang telah memberikan bantuan dalam penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir, Intakindo Kalsel, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini,

khususnya ditujukan kepada rekan-rekan tim penelitian, responden, dan Intakindo Kalimantan Selatan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Andi Fajar Asti sebagai kontributor utama dan Diana Mayasari sebagai anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>.
- Agam, Beryaldi, Wahyuni, Andi, P., Wijayanti, & Nurul, E. (2021). Perran Kelembagaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/fisheries/article/view/277/220>, 42-50.
- Alamri, S. A. (2021). Development Of Infrastructure and Supporting Facilities For he Minapolitan Area (Case Study: Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, Vol. 8 No.3, 2021(ISSN 2442 3262), 521-532. doi: <https://doi.org/10.35793/sp.v8i3.37264>.
- Ali, M. M., Aditya, Z. F., & Faudi, A. B. (2020). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurna Konstitusi*, Volume 17 Nomor 4, 799-827.
- Amir, S. S. (2021). Analisis Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (SDI) Yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang. *Jurnal SainsTeknologi & Lingkungan*(ISSN :2477-0329, e-ISSN : 2477-0310), 108-116. doi:DOI: <https://doi.org/10.29303/jstl.v0i0.265>.
- Athirafitri, N. I. (2021). Analisis Dampak Pengelolaan Hasil Perikanan Menggunakan Metode Life Cycle Assessment (LCA): Studi Literatur. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* (ISSN: 0216-3160 EISSN: 2252-3901), 274-282. doi:<https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2021.31.3.274>.
- Bappeda Kabupaten Tanah Laut. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut*. Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan: badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Basri, H. (2020, November 2). Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir, dan Laut di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Volume VIII Nomor 2(ISSN 2302-6219 E-ISSN 27225100), 1-27. Diambil kembali

- dari <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/download/3713/2153>.
- BNPB. (2022). <https://bnpb.go.id/>. Diambil kembali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BPK (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) di Kabupaten Tanah Laut. (2022). Diambil kembali dari <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/>.
- Dewi, A. I. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*(e-ISSN 2579-8561), 163-182. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182>.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. (2022). Diambil kembali dari <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1237>.
- Fikki, M. A. (2018). *Potensi Laban Untuk Budidaya Tambak Udang di Kecamatan sidang Cianjur Jawa Bara*. Diambil kembali dari Universitas Pendidikan Indonesia: [http://repository.upi.edu/38037/2/S\\_GEO\\_1403953\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/38037/2/S_GEO_1403953_Chapter1.pdf).
- Jamal, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Rechtsregel Jurnal Hukum, Vol 2, No 1 Agustus 2019*( P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243), 464-478.
- Jamilah., M. (2018). *Minapolitan perikanan Tangkap dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan*. Unimal Press, Sulawesi: <https://repository.unimal.ac.id/4187/1/%5BJamilah,%20Mawardati%5D%20Minapolitan%20Perikanan%20Tangkap%20dan%20Kemiskinan.pdf>.
- Karlina, I. S. (2021). Kalaborasi Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Desa Karangsong. *Jurnal Administrasi Negara (JANE), Volume 12, Number 2*(eISSN: 2597-758X, pISSN : 2086-1338), 75-82. Diambil kembali dari <https://jurnal.unpad.ac.id>.
- Malik, R. A. (2022, Mei). Analisis sektor unggulan komoditas perikanan di kawasan. *Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Akuantikisie), Vol 6 No 1*(EISSN 2598-8298), 31-37.
- Mukarim, F. A. (2021). Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan di Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur Kabupaten Floris Timur. *Plano Madani, Volume 10 Nomor 1 April 2021* 66-75(© 2021 P ISSN 2301-878X - E ISSN 2541-2973), 66-75.
- Nafarin. (2017). *Renstra (Rencana Strategis) Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalsel 2016-2021*. Kalimantan Selatan: [https://dpmptsp.kalselprov.go.id/web/wp-content/uploads/2020/03/Renstra\\_Perubahan.pdf](https://dpmptsp.kalselprov.go.id/web/wp-content/uploads/2020/03/Renstra_Perubahan.pdf).
- Nugroho, A. D., & Widayanti, D. W. (2020). Penguatan Strategi Untuk Pengembangan Minapolitan Kabupaten Cilangkap. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, J. Sosek KP Vol. 15 No. 2 Desember 2020: 145-157, 145--157*.
- Nurafiah, S. L. (2020). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kawasan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP), Volume 9 No. 1*(ISSN; 2302-9595, ISSN: 2721-6071), 9-14.
- Pabendon, R. G., Tharsisius. (2020). Strategi Pengembangan Wilayah-Wilayah Menjadi Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Sektor Basis di Kabupaten Mimika. *Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi, 68-87*.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035. (2015). Kalimantan Selatan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11762>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2021). Indonesia: LN.2021/No.31, TLN No.6633, [jdih.setkab.go.id](http://jdih.setkab.go.id) : 172 pp , <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. (2021). Indonesia: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021>.
- Perda Kab. Tanah Laut tentang RTRW, N. 2. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016--2036*. Diambil kembali dari <http://jdihn.go.id>: [https://jdihn.go.id/files/649/Perda\\_Kab\\_Tanah\\_Laut\\_No\\_3\\_Tahun\\_2016\\_ttg\\_RTRW\\_TALA-2016.pdf](https://jdihn.go.id/files/649/Perda_Kab_Tanah_Laut_No_3_Tahun_2016_ttg_RTRW_TALA-2016.pdf).
- Profil Potensi Usaha dan Peluang Investasi. (2019). Kalimantan Selatan: <https://kkp.go.id/an-component/media/>.
- Siregar, Muhammad Ramdhan Daulat., August Sudirman., Nasir (2021). Rencana Kebijakan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, E-ISSN : 2477-0299, https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v8i1.28992*, 11-22.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut (2016). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016--2036*. Provinsi Kalimantan Selatan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/13132>.
- Sahpitri, R. H. (2021). *Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru, Riau, Indonesia: Universitas Islam Riau, <https://repository.uir.ac.id/9383/1/143410590.pdf>.
- Santoso, Eko Budi Moenek., Reydonnyzar Nurpahdi., Mohamad. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintah Widy Praja, Vol. 45, No. 1*(p-ISSN 0216-4019, e-ISSN 2614-025X), 17-32.

- Sardia. (2020). *Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan*. Sulawesi Selatan: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makasar, [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3321/4/B022172032\\_tesis%20%201-2%28FILEminimizer%29.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3321/4/B022172032_tesis%20%201-2%28FILEminimizer%29.pdf).
- Septiani, S. (2018). SISTEM SOSIAL-BUDAYA PANTAI: Mata Pencarian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. *Sabda Volume 13 Nomor 1, SSN 1410-7910 E-ISSN 2549-1628*, <https://www.readcube.com/articles/10.14710%2Fsabda.13.1.83-92>, 1-10.
- Siagian, R. M., Darwis, & Yulinda, E. (2020). Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Kemiskinan di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bebagai. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir Volume 1 Nomor 4 Oktober 2020, E-ISSN: 2723-679X*, 64-69.
- Sriyono, S. D. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui. *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>, DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1697>, 81-89.
- Sukamta. (2019). *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023*. Kabupaten Tanah Laut: <file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/RPJMD%202018-2023%20Kabupaten%20Tanah%20Laut.pdf>.
- Sukamta. (2019). *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJM] Tahun 2018--2023*. Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan: Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Tasnia, N. I. (2021, September 2). Evaluasi Pengembangan Kawasan Minopolitan Kabupaten Bulukumba. *UNPLAN Jurnal of Urban and Regional Planning, Volume 2 No 2(E-ISSN 2747-2973)*, 1-6.
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Matra Pembaharuan, e-ISSN: 2549-5283*, <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84>, 75-84.
- Ubadiyah, F. (2022). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2022*. Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan: BPS Kabupaten Tanah Laut.